

STRATEGI INTERNASIONALISASI MATA UANG TIONGKOK

MELALUI SKEMA BILATERAL

(Studi Kasus: *Local Currency Swap Arrangement* Tiongkok dan Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

ARMIRAYANTI AMIR

E061181020

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

STRATEGI INTERNASIONALISASI MATA UANG TIONGKOK

MELALUI SKEMA BILATERAL

(Studi Kasus: *Local Currency Swap Arrangement* Tiongkok dan Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

ARMIRAYANTI AMIR

E061181020

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI INTERNASIONALISASI MATA UANG
TIONGKOK MELALUI SKEMA BILATERAL (Studi Kasus :
Local Currency Swap Arrangement Tiongkok-Indonesia)

NAMA : ARMIRAYANTI AMIR

NIM : E061181020

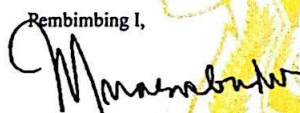
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 17 Maret 2022

Mengetahui :

Rembimbing I,



Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,



Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI INTERNASIONALISASI MATA UANG
TIONGKOK MELALUI SKEMA BILATERAL (Studi Kasus :
Local Currency Swap Arrangement Tiongkok-Indonesia)

N A M A : ARMIRAYANTI AMIR

N I M : E061181020

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 24 Februari 2022.

TIM EVALUASI

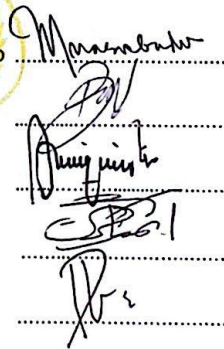
Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si



Handwritten signatures of the evaluation team members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armirayanti Amir
Nomor Pokok : E061181020
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : STRATEGI INTERNASIONALISASI MATA UANG
TIONGKOK MELALUI SKEMA BILATERAL (Studi
Kasus: *Local Currency Swap Arrangement* Tiongkok
dan Indonesia)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 April 2022

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERA TEMPEL', and 'KORSI4BAJX05050971'.

Armirayanti Amir

E061181332

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Internasionalisasi Mata Uang Tiongkok melalui Skema Bilateral (Studi Kasus : *Local Currency Swap Arrangement Tiongkok Indonsian*)**”. Skripsi tersebut merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menjadi salah satu kontribusi penulis kepada bidang keilmuan yaitu dengan memberikan informasi terkait penggunaan mata uang yuan secara global namun dikaji melalui skema bilateral.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penelitian ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kritik maupun saran bagi penulis sangatlah diperlukan untuk memberikan hasil tulisan yang jauh lebih baik bagi penelitian selanjutnya. Dengan harapan yang tulus dari penulis agar skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu khususnya kepada kedua orang tua, saudara dan saudari yang dengan tulus memberikan cinta, kasih sayang dan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan dengan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Hasanuddin hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir sarjana. Selain itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin yaitu, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA beserta jajarannya.
2. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan seluruh staf fakultas.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional yaitu, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D
4. Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing I serta Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah menuntun dan memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional beserta staf khususnya Kak Rahma dan Pak Dayat yang telah memberikan banyak pelajaran dan membantu penulis dalam berbagai hal.
6. Bugis Corner + Muniff yang telah sudah mau menjadi teman baik bagi penulis yang sangat penuh dengan kekurangan ini haha. Untuk Wiwi yang merupakan salah satu teman dari SMA, terima kasih sudah menjadi rumah dan banyak bantu penulis dalam banyak hal selama kuliah. Untuk Munif si rempong nan lucu dan Rian atau bonte panggilan spesial dari Bugis Corner, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya. Defki atau akrab disapa dedef dan si tembem Rina anaknya mak una, terima kasih sudah menjadi salah satu bagian dari kenakalan penulis dan memberikan semangat untuk selesaikan skripsi ini wkwk. Untuk sule si polos seperti bayik, terima kasih bantuan dan dukungannya, serta untuk husna, terima kasih sudah sabar menghadapi penulis yang tukang gas haha. Bukan hanya itu untuk Syahrin

dan Indra terima kasih telah memberikan dukungan selama ini. Semoga kalian semua bertemu dengan orang-orang seperti penulis dikemudian hari.

7. Grup Cewe-cewe nakal nya penulis, benar-benar nakal sampai nama grup kami adalah ANUENA. *Please don't judge by group name!* wkwkw Mereka tuh sangat spesial dan baik banget. Mereka adalah Hastuti Anince (Tuti), Husniah. S (Yuni), Andi Fitri Farwati (ajie), Andi Nur Mujahidah (Mujigae), Aziza Firda Asrianty (Cicacuuu), Nuralifya Anugrah (Cuplis). Penulis tidak bisa mendeskripsikan mereka satu persatu karena kami memiliki sifat dan kelakuan yang sama, yah sama-sama *crazy*. Terima kasih besti sudah ada disaat penulis butuh *HEALING*. Tidak hanya itu, terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis mulai dari kecil, yah mereka sangat spesial dan beberapa diantara mereka menjadi teman baik sedari masih TK hingga sekarang dan akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Tigaipadua, yah grup SMA yang sampe sekarang menjadi teman baik dan teman jalan terkhusus pada Basir, Iksan, A.Ayub, Agung, A.Aidil, A.Resa, Fadingga, Along, Rahmat dan semuanya yang berada di dalam grup tersebut. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kebahagiaan wkwkw.
9. Reforma 18, nama angkatan Hubungan Internasional, terima kasih atas semua kenangan dan bantuannya selama ini.

10. Teman-teman SMA dan teman-teman KKN, yang sampai sekarang masih berteman baik dengan penulis mengucapkan banyak terima kasih.
11. Gojukai Fisip Unhas, kakak, teman, dan adik-adik yang baik hati terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Makassar, 25 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

ARMIRAYANTI AMIR, E061181020. “Strategi Internasionalisasi Mata Uang Tiongkok melalui Skema Bilateral”. Dibawah bimbingan Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing I serta Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II, pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambisi Tiongkok yang ingin menjadikan mata uang yuan sebagai pembayaran Internasional. Melalui suatu bentuk kerjasama dengan berbagai negara yaitu penggunaan mata uang lokal dalam setiap transaksi antar negara yang bekerjasama. Memiliki kepentingan nasional dan ketergantungan dengan negara lain menciptakan kerjasama untuk mencapai kepentingan tersebut. Dengan demikian, melalui kerjasama *Local Currency Swap Arrangement* Tiongkok dan Indonesia menjadi salah satu contoh kasus dalam mencapai kepentingan kedua negara. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada kepentingan Tiongkok untuk menjadikan mata uang yuan sebagai alat pembayaran internasional bersanding dengan dolar, yen, euro dan poundsterling.

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui strategi Tiongkok dan prospek internasionalisasi yuan atau renmimbi melalui skema bilateral. Dengan demikian untuk mengkaji hal tersebut penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian secara terperinci dengan menggunakan data sekunder dan dideskriptifkan dari umum ke khusus. Dengan demikian hasil temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa Tiongkok menjadikan kerjasama bilateral dan politik mata uang untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Melalui kerjasama bilateral penggunaan yuan terus meningkat, hal ini dikarenakan Tiongkok adalah negara dengan perekonomian serta infrastruktur penghubung antar negara yang terus meningkat dan nilai mata uang yang stabil sehingga banyak negara yang ingin menjalin kerjasama ekonomi dengan negara tirai bambu tersebut. Selain itu keberhasilan Tiongkok bisa dilihat dari pencapaiannya hingga saat ini mata uang yuan dikenal secara global dan menjadi salah satu mata uang yang digunakan di dunia.

Kata Kunci : Internasionalisasi Yuan, Kerjasama Bilateral, *Currency Politics* (Politik Mata Uang)

ABSTRACT

ARMIRAYANTI AMIR, E061181020. “China Currency Internationalization Strategy through Bilateral Scheme”. Under the guidance of Mr. Muhammad Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D as supervisor I and Mrs. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si as supervisor II, majoring in International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research is motivated by China's ambition to make the yuan currency an international payment. Through cooperation with various countries, namely the use of local currency in every transaction between cooperating countries. Having national interests and dependence on other countries creates cooperation to achieve these interests. Thus, through the cooperation of the Local Currency Swap Arrangement, China and Indonesia are example of a case in achieving the interests of both countries. However, this research focuses on China's interest in making the yuan currency an international payment instrument alongside the dollar, yen, euro and pound sterling.

The purpose of this research is to find out China's strategy and prospects for the internationalization of the yuan or renmimbi through a bilateral scheme. Thus, to examine this, the author uses qualitative research to explain the research results in detail using secondary data and is described from general to specific. Therefore the findings in this study illustrate that China makes bilateral cooperation and currency politics to achieve its national interests. Through bilateral cooperation, the use of the yuan continues to increase, and this is because China is a country with an increasing economy and liaison infrastructure between countries and a stable currency value, so many countries want to establish economic cooperation with the bamboo curtain country. In addition, China's success can be seen from its achievements to date, the yuan is known globally and has become one of the currencies used in the world.

Keywords: Yuan Internationalization, Bilateral Cooperation, Currency Politics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kerjasama Bilateral	22
B. <i>Currency Politics</i>	30
BAB III STRATEGI TIONGKOK DAN KERJASAMA <i>LOCAL CURRENCY</i> <i>SWAP ARRANGEMENT</i>	41
A. Mata Uang Yuan sebagai Pembayaran Internasional.....	41

B. Kerjasama Tiongkok dan Indonesia tentang <i>Local Currency Swap Arrangement</i> Kerjasama Bilateral	56
BAB IV STRATEGI TIONGKOK DALAM INTERNASIONALISASI MATA UANG MELALUI SKEMA BILATERAL	
A. Strategi dalam Internasionalisasi Mata Uang Tiongkok melalui Skema Bilateral	63
B. Prospek dan Keberhasilan Tiongkok dalam Internasionalisasi Mata Uang melalui skema bilateral.....	78
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan Internasional di masa sekarang penuh dengan problematika yang sangat meresahkan suatu negara. Kehidupan yang semakin rumit menjadikan suatu negara ketergantungan satu dengan yang lainnya demi mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, salah satunya antara Tiongkok dan Indonesia. Keinginan suatu negara menguasai dunia dan memiliki *power* yang kuat terhadap laju perkembangan global serta menjadi salah satu ambisi dan persaingan negara-negara besar. Melalui berbagai strategi untuk mencapai kepentingan nasional negaranya salah satunya melalui bentuk kerjasama antar negara.

Dilihat secara konseptual, tujuan utama dalam hubungan kerjasama yaitu untuk membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan serta menjalin suatu persahabatan antar negara. Disamping itu, untuk mewujudkan kepentingan nasional di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, serta politik dan juga keamanan. Kerjasama antar negara sangat dibutuhkan untuk menunjang kepentingan nasionalnya, baik kerjasama bilateral, regional maupun multilateral.

Telah diketahui bahwa Indonesia dan Tiongkok telah melakukan hubungan sejak sebelum masehi. Paska kemerdekaan Indonesia hubungan kedua negara tersebut meningkat ke level yang lebih tinggi disebut hubungan

bilateral dengan rentang waktu tahun 1950-1967. Negara Indonesia pada saat ini dianggap sebagai negara pertama yang mengakui Tiongkok dibawah pemerintahan komunis. Indonesia telah mengakui kedaulatan China yaitu pada tanggal 15 januari 1950 kemudian di tahun 1953, Indonesia mengirim seorang Duta Besar yaitu Arnold Manonutu untuk Beijing dan dilanjutkan penandatanganan nota kerjasama kedua negara. Terlihat kerjasama kedua negara telah berjalan sejak lama (Rachmayanti, 2013).

Dalam rangka mewujudkan dan memperkuat kerjasama, Tiongkok dan Indonesia melakukan suatu pertemuan di tahun 2010 untuk membahas tentang kerjasama bilateral terkait penggunaan mata uang lokal yaitu Yuan dan Rupiah. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh perwakilan dari bank sentral masing-masing negara yaitu dalam hal ini Bank Indonesia dengan Bank Sentral Tiongkok. Pembahasan mengenai *Repurchase Agreement Chinese Yuan* dibahas dalam salah satu dasar hukum yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/6/PBI/2010 (Armenia, 2015).

Tiongkok adalah negara yang besar dan cukup dekat dengan Indonesia, oleh karenanya untuk menjalin dan menjaga hubungan agar tetap baik salah satunya melalui suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hal positif bagi kedua negara. Dalam hal ini Tiongkok menjalin kerjasama mata uang dengan berbagai negara seperti Nigeria, karena tingginya volume perdagangan antara Nigeria dan Tiongkok maka dari itu mereka melakukan kerjasama mata uang untuk mempermudah bisnis kedua negara tersebut (Oseghe, 2019). Selain Nigeria, yuan kini juga digunakan sebagai alat tukar

di negara Mongolia yang hampir 60% peredaran uangnya menggunakan mata uang Tiongkok (Jayakarya, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang membutuhkan kerjasama dengan negara mitra guna untuk menjaga ataupun mengembangkan perekonomian negara. Berbagai strategi kerjasama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Sentral negara lain salah satunya dengan China. Negara akan melakukan banyak hal untuk meningkatkan perekonomian negaranya.

Tiongkok dan Indonesia merupakan dua negara yang telah melakukan kerjasama selama puluhan tahun lamanya. Dua negara besar yang memiliki keunikan dengan karakteristik tersendiri dalam berbagai bidang seperti dalam hal perekonomian, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya. Tiongkok dan Indonesia dengan kelebihan masing-masing baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Kedua negara tersebut selama ini ikut berkontribusi dalam berbagai kerjasama salah satunya melalui *Local Currency Swap Arrangement*. Dengan melihat persaingan global yang saat ini dipenuhi oleh berbagai masalah global salah satunya ialah stabilitas nilai tukar dan negara *super power* yang ingin meningkatkan penggunaan mata uangnya secara internasional. Stabilitas nilai tukar merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki hampir semua negara, mengingat ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok yang menjadi salah satu negara yang memiliki *power* ingin menjadikan Yuan sebagai mata uang internasional.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa, dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan peluang dalam mencapai kepentingan masing-masing negara. Dalam hal ini, negara Indonesia melalui kerjasama bilateral dianggap dapat mendukung stabilitas nilai rupiah, mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu, khususnya mata uang dolar serta meningkatkan perekonomian negaranya. Sementara bagi Tiongkok yang diwartakan dalam *China Daily* (media yang dimiliki Departemen Propaganda Komite Pusat Partai Komunis Cina), kerjasama ini dianggap sebagai tindak lanjut dalam internasionalisasi mata uang Yuan yang merupakan salah satu cita-cita Tiongkok untuk menjadikan mata uang Renmimbi sebagai mata uang internasional (Zaenudin, 2021).

Melalui kerjasama *Local Currency Swap Arrangement* yang merupakan salah satu instrumen dalam suatu sistem keuangan internasional yang dimana pelakunya dilakukan oleh dua negara. Dua negara tersebut dapat melakukan suatu peminjaman mata uang negara lain dengan negara partner melalui bank sentral masing-masing negara sebagai bentuk usaha negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat (Faradila, 2016). Selain itu peminjaman mata uang negara lain akan menunjang perdagangan internasional antar negara.

Ditahun 2018 Indonesia dan Tiongkok meningkatkan hubungan kerjasama dengan memperbarui perjanjian terkait dengan penggunaan mata uang lokal dan ditandatangani oleh Gubernur BI yaitu Perry Warjiyo. Dengan adanya perjanjian tersebut dapat merefleksikan adanya penguatan kerjasama

moneter dan juga keuangan antara BI dan PboC, selain itu juga menunjukkan komitmen kedua bank untuk menjaga stabilitas keuangan diantara ketidakpastian pasar keuangan global yang setiap tahun tidak menentu (Nurfadilah, 2018). Untuk mendukung kerjasama tersebut, Bank Indonesia dan juga PBC telah menunjuk beberapa bank dari negara masing-masing yang dianggap memiliki kemampuan dalam memfasilitasi transaksi Yuan dan Rupiah diantaranya *PT Bank Central Asia Tbk, Bank of China (Hongkong) Ltd, Agriculture Bank of China, Bank of China Bank of Ningbo, Bank Mandiri Shanghai Branch*, dan lainnya. (Puspaningtyas, 2021).

Berdasarkan kerjasama yang telah dijalankan sampai saat ini, membuktikan bahwa adanya peningkatan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Perjanjian ini adalah salah satu bentuk pengembangan lebih lanjut dalam penyelesaian masalah antara dua negara secara global, baik ekspor- impor (*Trade*) ataupun dalam transaksi internasional. Berbagai kebijakan tentunya akan membantu dalam memperoleh suatu kepentingan dari kedua negara tersebut.

Dalam internasionalisasi mata uang negara *super power* menggunakan berbagai strategi untuk mewujudkan mata uang negaranya bisa dipakai dalam lintas negara. Melalui kerjasama antar negara dijadikan sebagai salah satu cara agar mata uang negara bisa digunakan dinegara partner bahkan digunakan secara global. Tiongkok dengan *power* yang dimiliki dan erat kaitannya dengan Indonesia yang menjalin kerjasama penggunaan mata uang tersebut agar Yuan dan juga Renmimbi bisa

digunakan di Indonesia. Selain itu, internasionalisasi mata uang erat juga kaitannya pada stabilitas mata uang dan bersaing dengan dolar Amerika Serikat yang kita ketahui dolar adalah mata uang yang paling banyak digunakan saat ini.

Mata uang merupakan hal yang sangat penting dalam sektor perekonomian nasional maupun internasional. Ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat membuat Tiongkok melakukan berbagai cara untuk menjadikan mata uangnya sebagai mata uang internasional. Dalam hal ekonomi nasional, setiap negara akan mempertahankan nilai tukar mata uang negaranya. Melalui kerjasama *Local Currency Swap Arrangement* antara Tiongkok dan Indonesia dianggap menjadi salah satu contoh untuk meng-internasionalisasikan mata uang Tiongkok, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana **Strategi Internasionalisasi Mata Uang Tiongkok melalui Skema Bilateral** dengan mengambil salah satu studi kasus *Local Currency Swap Arrangement* antara Tiongkok dan Indonesia sebagai bentuk nyata internasionalisasi mata uang yuan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berkaitan dengan dua negara yang memiliki kepentingan berbeda yaitu Tiongkok dan juga Indonesia. Kerjasama mencakup beberapa aspek seperti ekonomi, keamanan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Kerjasama kedua negara tentunya untuk memperoleh kepentingan masing-masing. Indonesia dengan negara berkembang ingin meningkatkan perekonomian melalui cara dengan

menjalin kerjasama dengan negara maju salah satunya ialah Tiongkok. Tiongkok dalam kerjasama ini memiliki kepentingan untuk menjadikan mata uang Yuan sebagai mata uang internasional yang dapat digunakan lintas negara. Namun batasan masalah yang akan penulis bahas ialah kepentingan Indonesia bersifat pasif dan kepentingan Tiongkok bersifat aktif. Khususnya penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana strategi Internasionalisasi mata uang Tiongkok melalui skema kerjasama bilateral dengan mengambil studi kasus kerjasama *Local Currency Swap Arrangement*.

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana strategi Tiongkok dalam internasionalisasi mata uang melalui skema bilateral?
2. Bagaimana prospek dan keberhasilan Tiongkok dalam internasionalisasi mata uang melalui skema bilateral?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui strategi Tiongkok dalam internasionalisasi mata uang melalui skema bilateral.
- b. Untuk mengetahui prospek dan keberhasilan Tiongkok dalam internasionalisasi mata uang melalui skema bilateral.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian tentunya memiliki kegunaan, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi khususnya dalam bentuk kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara merupakan salah satu instrument penting bagi studi hubungan internasional.
2. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi aktor-aktor untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang akan digunakan oleh penulis untuk melihat dan menganalisis penelitian yang akan diteliti. Kerangka konsep memiliki arti yang sangat penting bagi suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yaitu Kerjasama Bilateral dan Politik Mata Uang (*Currency politics*). Konsep tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

a. Kerjasama Bilateral

Pada dasarnya semua negara tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan negara lain untuk mencapai kepentingan negaranya dan untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap negara membutuhkan

kerjasama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Adanya perkembangan dunia internasional saat ini ditandai dengan adanya kerjasama internasional untuk memecahkan suatu permasalahan, menjalin persahabatan dan lain sebagainya.

Suatu proses kerjasama mulai terbentuk dari banyaknya keanekaragaman masalah seperti masalah regional, nasional serta masalah internasional. Setiap negara melakukan suatu pendekatan dengan aktor lain untuk tujuan mencari suatu solusi akan permasalahan yang dialami negaranya. Menurut K.J Holsti kerjasama dapat di defenisikan sebagai berikut;

- a). Pandangan pertama mengatakan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak yang bersangkutan.
- b). Pandangan kedua ialah harapan dari suatu negara bahwa dengan kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya maka akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan nilai-nilainya.
- c). Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan adanya persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

- d). dalam aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan yang telah disepakati.
- e). Transaksi antar negara bertujuan untuk memahami persetujuan mereka (Holsti,1993).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh Holsti, dalam penelitian ini mencakup hamper semua defenisi yang ada. Menjadikan kerjasama untuk tujuan mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dengan memanfaatkan hubungan yang baik, saling menguntungkan dan harapan yang sama akan suatu hal.

Selain, K.J Holsti, terdapat pendapat lain yang berasal dari Koesnadi Kartasasmita yang berpendapat bahwa, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan independensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 1997). Melalui adanya suatu bentuk kerjasama akan memberikan kemudahan dalam mencapai kepentingan masyarakat, individu, negara maupun aktor lainnya.

Kerjasama Internasional dapat dikategorikan atas 3 yaitu sebagai berikut;

1. Kerjasama Bilateral, merupakan suatu perjanjian yang terdiri

atas dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract*.

2. Kerjasama Regional, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara kawasan dan bersifat terbatas, *Law Making Treaty* dan juga *Treaty Contract*.
3. Kerjasama Multilateral, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara mana saja tanpa dibatasi region dalam artian bersifat internasional dan *Law Making Treaty* (Pfaltzgraff, 1997).

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini berfokus pada kerjasama bilateral yang dilakukan antar dua negara yaitu Indonesia dan juga Tiongkok. Khususnya membahas tentang kerjasama *Bilateral Currency Swap Arrangement* atau yang disingkat dengan BCSA. Dalam kerjasama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Dimana, Indonesia dengan kepentingan untuk peningkatan perekonomian sedangkan Tiongkok yang menginginkan internasionalisasi yuan semakin ditingkatkan serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain yang telah disebutkan, seorang Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya juga memberikan suatu defenisi tentang hubungan bilateral yang mengatakan bahwa; “Hubungan bilateral adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya

hubungan yang saling mempengaruhi atau dikatakan sebagai hubungan timbal balik antara dua negara yang bekerja sama” (Krisna, 1993). Dalam hal ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara negara Tiongkok dan Indonesia dalam penggunaan mata uang lokal yaitu Yuan dan Rupiah. Namun fokus pada penelitian ini ada pada Tiongkok yang menjadikan kerjasama tersebut sebagai salah satu strategi sebagai tindak lanjut dari internasionalisasi mata uang yuan atau renminbi.

Ketika berbicara mengenai hubungan atau kerjasama bilateral, hal tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional masing-masing negara. Kerjasama bilateral bisa dikatakan timbul akibat adanya suatu kepentingan yang mendasari kesepakatan antar dua negara yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, semua negara untuk merumuskan kebijakan, harus berdasarkan pada kepentingan nasional negaranya. Kebijakan luar negeri ini merupakan strategi atau upaya yang berupa tindakan oleh para pembuat keputusan untuk menghadapi negara lain atau unit politik lainnya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya (Rudy, 2002).

Tiongkok dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, dan Tiongkok merupakan salah satu negara *super power*, sehingga dengan menjalin kerjasama dengan berbagai negara bisa

membantu untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selain Tiongkok, Indonesia tentunya juga memiliki kepentingan dalam kerjasama tersebut yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian Indonesia.

b. Currency Politics

Dalam ilmu ekonomi modern, dijelaskan beberapa pengertian uang yakni segala sesuatu yang dapat diterima masyarakat secara umum. Digunakan sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembayaran barang, jasa, maupun utang piutang. Uang ini juga dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu benda yang memiliki satuan hitung tertentu yang dapat digunakan untuk membayar atau alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan diakui oleh suatu wilayah tertentu. Dengan ini, uang dapat dimaknai sebagai benda yang disepakati oleh masyarakat sebagai perantara dalam kegiatan tukar menukar barang maupun jasa dan juga sebagai alat yang dapat menghitung kekayaan yang dimiliki.

Menurut penjelasan diatas, terdapat beberapa syarat yang menjadikan suatu benda layak disebut sebagai uang yakni sebagai berikut;

Dapat diterima oleh masyarakat secara umum

/acceptability

- Tidak mengalami suatu perubahan dan tidak mudah rusak

/durability

- Nilainya pun tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama */stability of value*
- Praktik dan mudah dibawa kemana-mana */portability*
- Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya */divisibility*
- Kualitasnya yang relatif sama */uniformity*
- Jumlahnya yang terbatas dan tidak mudah dipalsukan */scarcity*. (William, 2021).

Dari beberapa syarat diatas, terlihat bahwa uang memiliki nilai yang sangat penting baik bagi individu maupun bagi suatu negara. Dengan demikian, nilai uang tiap negara memiliki kapasitas yang berbeda-beda sehingga mata uang masing-masing negara memiliki keunggulan yang berbeda. Mata uang tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang terlebih mata uang internasional harus memiliki karakteristik tersendiri sehingga dapat digunakan sebagai alat transaksi antar negara.

Selain defenisi yang telah penulis paparkan diatas, terdapat sejumlah ahli ekonomi modern yang merumuskan berbagai pengertian uang yang berbeda. Dalam tulisan yang dijelaskan oleh William memberikan pendapat dari beberapa ahli

mengenai defenisi uang. Menurut Rollin G. Thomas dalam sebuah buku yang berjudul *Our Modern Banking and Monetary System* ditahun 1942, yang berbunyi; uang merupakan segala sesuatu yang siap sedia dan dapat diterima secara umum untuk suatu pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lainnya, serta dapat digunakan dalam pembayaran utang. Selain Rollin, pendapat lainnya muncul dari Dennis H. Robertson dalam sebuah bukunya yang berjudul *Money* tahun 1922. Dennis mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Sedangkan menurut A.C. Pigou dalam bukunya *The Veil of Money* pada tahun 1949, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar (William, 2021).

Dari berbagai defenisi uang, inti dari segala pendapat ialah uang merupakan alat yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum dan dapat digunakan sebagai alat tukar baik untuk barang, jasa maupun lainnya yang memiliki nilai tertentu. Berbicara mengenai uang, tidak lepas dengan kaitannya dengan ekonomi dan juga politik. Mata uang merupakan hal penting bagi suatu perekonomian negara, digunakan sebagai alat tukar dan menunjang terjadinya suatu transaksi perdagangan. Selain ekonomi, uang pun dibahas dalam tatanan politik karena memiliki pengaruh yang sangat besar pada suatu sistem

pemerintahan negara.

Menurut Jeffrey A. Frieden dalam bukunya menjelaskan bahwa mata uang dan nilainya adalah pusat ekonomi dunia yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional, investasi, keuangan dan lainnya. Berakhirnya perang dunia 1 dan 2 serta runtuhnya sistem mata uang Bretton Woods, menunjukkan bahwa nilai tukar menjadi sangat penting. Di era globalisasi saat ini, kebijakan nilai tukar telah dimainkan dan menjadi peran utama hampir disemua sektor perekonomian. Sebagai salah satu contoh yang tertuang dalam bukunya yaitu Uni Eropa yang berusaha untuk mempertahankan stabilitas mata uang negara-negara anggotanya. Negara-negara terkemuka menjadikan kebijakan mata uang tersebut sebagai salah satu hal yang sangat penting baik dalam negeri maupun antara negara lainnya (Frieden, 2015).

Negara-negara berkembang pun seperti Indonesia menghadapi keputusan yang penting berkaitan dengan mata uang dan nilai tukar. Beberapa diantara mereka telah menyesuaikan dengan mata uang internasional seperti Dolar, Euro, Yen dan mata uang lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang menjalin kerjasama mata uang dengan berbagai negara seperti Tiongkok dan dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Politik nasional

membentuk suatu kebijakan mata uang dan kemungkinan adanya masa depan rezim mata uang Internasional. Dalam hal ini Tiongkok membuat kebijakan-kebijakan untuk menjadikan mata uang Tiongkok sebagai mata uang internasional dan mempertahankan stabilitas mata uang negaranya. Seperti menggunakan mata uang yuan dalam nota pembayaran perdagangan Tiongkok dengan negara partner.

Dalam konsep ini dijelaskan bahwa adanya kepentingan ekonomi dalam pembuatan suatu kebijakan yang berkaitan dengan mata uang atau nilai tukar. Kebijakan mata uang dengan memperhitungkan kepentingan dan pengaruh kelompok kepentingan ekonomi. Mengingat hubungan antara mata uang nasional dan internasional merupakan fitur utama dalam suatu perekonomian dunia (Frieden, 2015).

Ada banyak faktor yang menjadi alasan bagi suatu negara mengambil suatu kebijakan dalam mata uang negaranya. Tiongkok adalah negara dengan perekonomian yang sangat baik oleh karena itu, pentingnya menjaga stabilitas dan meningkatkan penggunaan mata uang Tiongkok. Berbeda dengan Tiongkok, Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan perekonomian yang cukup rendah mengambil suatu keputusan dengan menjalin kerjasama mata uang dengan negara besar seperti Tiongkok dengan kepentingan untuk memperbaiki

perekonomian negaranya terlebih ditengah pandemi covid perekonomian Indonesia mengalami penurunan.

Perekonomian adalah masalah global dan menjadi hal terpenting bagi semua negara. Meskipun persoalan mata uang menjadi hal yang sangat kontroversial, tetapi penting bagi semua negara untuk mengambil keputusan dalam hal penggunaan mata uang tersebut. Kebijakan mata uang lebih kontroversial secara politis untuk ekonomi terbuka dimana perdagangan internasional tunduk pada fluktuasi yang tidak pasti dalam arus modal internasional. Fluktuasi merupakan suatu perubahan naik turunnya variable. Dalam perspektif ekonomi dijelaskan bahwa, fluktuasi berarti tidak teraturnya suatu pergerakan harga dari suatu barang. Hal tersebut dapat dipengaruhi berdasarkan kesepakatan antar negara yang melakukan suatu perdagangan atau kerjasama (Frieden, 2015). Dalam hal ini kerjasama mata uang antara Tiongkok dan Indonesia bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang mempengaruhi adanya kebijakan terkait penggunaan mata uang kedua negara.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang strategi Tiongkok

dalam internasionalisasi mata uang Yuan dan Renmimbi melalui skema kerjasama bilateral dengan mengangkat satu kasus yaitu kerjasama *Local Currency Swap Arrangement* antara Tiongkok dan Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Pada dasarnya data berupa informasi atau bahan dan peneliti akan mencari, mengumpulkan dan memilih data yang akan digunakan (Nugrahani, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data secara tidak langsung dilapangan yang disebut data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, internet, yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam suatu penelitian, data sekunder dapat digunakan untuk memudahkan proses penelitian dan mendapatkan data yang akurat karena telah

melalui suatu tahap analisis. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder untuk memudahkan dalam proses pengumpulan data.

d. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin penelitian dengan teknik ini tidak diperoleh melalui bentuk statistik ataupun bentuk hitungan lainnya, melainkan merujuk pada analisis data non-matematis (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber serta menggunakan teknik yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2013). Menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bagaimana strategi Tiongkok dalam Internasionalisasi mata uang melalui skema bilateral dengan mengangkat studi kasus kerjasama *Local Currency Swap Arrangement* antara Tiongkok dan Indonesia, melalui data yang ada serta mencari kaitan keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

e. Teknik Penulisan

Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah

deduktif, dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran secara umum atau ide pokok paragraf untuk kemudian diikuti oleh penjelasan lainnya dan terakhir ditarik kesimpulannya secara khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Bilateral

Sejak awal, teori hubungan internasional berfokus pada bagaimana mempelajari penyebab-penyebab atau kondisi yang dapat menciptakan suatu kerjasama. Kerjasama dapat tercipta karena adanya akibat dari suatu penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor yang merespon keputusan atau pilihan yang dipilih oleh aktor lainnya. Kerjasama tersebut dapat berjalan dalam suatu proses yang disebut perundingan dan diadakan secara nyata atau karena semua pihak telah mengetahui sehingga tidak diperlukan lagi adanya suatu perundingan (Pfaltzgraff, 1997).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan- hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Pfaltzgraff, 1997).

Kerjasama dapat tercipta apabila kedua belah pihak merasa dan percaya bahwa melalui kerjasama tersebut dapat memperoleh suatu keuntungan dan mencapai kepentingan negaranya. Sehingga isu

utama dalam teori kerjasama ialah adanya pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasilnya akan diperoleh berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama tersebut. Dengan adanya kepentingan lahiriah kerjasama dimana setiap aktor baik kelompok, individu, negara akan memerlukan bantuan dari aktor lainnya. Sehingga kerjasama tercipta karena suatu hal baik berupa pemenuhan kepentingan, konflik atau penyelesaian suatu masalah yang diyakini dapat terselesaikan apabila melalui suatu bentuk kerjasama.

Diskusi tentang kerjasama internasional secara teori dapat dilihat melalui hubungan antara dua negara atau antara unit-unit yang lebih besar dan disebut sebagai kerjasama secara multilateral. Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang bersifat formal, adanya aturan- aturan, norma-norma, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari adanya kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik atas dasar susunan tata internasional (Pfaltzgraff, 1997).

Suatu kerjasama internasional didorong oleh adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kemajuan pada bidang teknologi yang dapat menyebabkan semakin mudahnya suatu hubungan terjalin antar negara sehingga muncul ketergantungan antara satu sama lain.
2. Kemajuan dan perkembangan perekonomian dimana dapat

mempengaruhi kesejahteraan suatu negara atau bangsa.

3. Perubahan terjadi pada konteks peperangan dimana muncul suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Munculnya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satunya melalui metode kerjasama internasional dengan tujuan dan harapan dapat memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan melalui tahap negosiasi antar pihak yang bekerjasama (Kartasmita, 1997).

Faktor-faktor tersebut sebagai sebab dari terciptanya suatu bentuk kerjasama. Pada penelitian ini termasuk dalam faktor nomor dua yang mengatakan bahwa kerjasama tercipta karena adanya kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini Indonesia ingin meningkatkan perekonomian negaranya sedangkan Tiongkok ingin menjadikan mata uang yuan digunakan secara internasional (lintas negara) baik dalam perdagangan internasional maupun dalam menyaingi dolar dan mengurangi ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat.

Dalam dunia internasional, setiap negara memiliki strategi tersendiri dalam mempertahankan negaranya baik dalam hal perekonomian maupun lainnya. Dalam hal ini Tiongkok adalah salah satu negara besar dengan perekonomian yang maju dan menjalin kerjasama mata uang dengan negara berkembang yaitu Indonesia.

Mencapai tujuan masing-masing negara melalui suatu bentuk kerjasama yang dianggap sebagai strategi dalam mewujudkan kepentingan negara.

Dalam kerangka pemahaman Holsti, menjelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada banyaknya kasus, pemerintah saling menjalin persahabatan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang ada, mengemukakan bukti-bukti penyelesaian masalah tersebut dan mengakhiri perundingan dengan sebuah perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat. Proses inilah dinamakan sebagai kerjasama (Holsti, 1993). Dalam kerjasama tersebut tertuang suatu kesepakatan yang akan menunjang tercapainya suatu kepentingan antar negara yang bekerjasama.

Kerjasama dua negara merupakan kerjasama internasional dalam hal ini disebut juga dengan kerjasama bilateral. Bilateralisme dapat dilihat pada relasi politik dan budaya oleh dua negara yang bekerjasama, contohnya: penandatanganan dan perjanjian, kunjungan kenegaraan dan lainnya. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama politik, ekonomi, budaya antar dua negara. Kerjasama bisa melalui berbagai konteks, kebanyakan terjadi pada dua pemerintahan yang memiliki kepentingan dan masalah yang sama. Hubungan bilateral hanya melibatkan antara dua negara, karena *bi* artinya dua. Hubungan ini paling banyak dilakukan oleh Tiongkok, bukan hanya

dengan Indonesia tetapi Tiongkok telah melakukan kerjasama pertukaran mata uang lokal dengan berbagai negara.

Adanya pola interaksi timbal balik antar dua negara dalam suatu hubungan internasional didefinisikan sebagai hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah salah satu konsep yang terdapat dalam hubungan internasional, mempunyai arti atau makna yang lebih kompleks dan beragam pengertian tentunya berkaitan dengan dinamika ilmu hubungan internasional. Dalam kamus politik internasional, hubungan atau kerjasama bilateral dapat diartikan sebagai, “...keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi satu sama lain”. Dari pernyataan tersebut mengartikan bahwa hubungan bilateral memiliki batasan yaitu terlibat pada dua negara saja, seperti halnya yang terjadi antara Tiongkok dan Indonesia.

Suatu kerjasama tercipta karena adanya kepentingan nasional masing-masing negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa:

Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano C., 1990).

Selanjutnya, selain Plano dalam kamus politik internasional seorang Didi Krisna mendefinisikan konsep kerjasama bilateral yaitu:

“hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)” (Krisna, 1993). Dari sekian banyaknya definisi kerjasama bilateral, hampir semua ahli mengandung arti yang sama yaitu, kerjasama bilateral terjalin antar dua negara yang memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing.

Penggambaran terkait hubungan bilateral tidak lepas dari adanya suatu kepentingan nasional masing-masing negara sehingga bersedia untuk melakukan hubungan dan menjalin adanya kerjasama antar kedua negara. Tujuan-tujuan tersebut dapat menciptakan perdamaian dan tetap memperhatikan kerjasama di bidang seperti politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dengan kata lain, suatu hubungan tercipta tidak lepas dari hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta saling menguntungkan satu sama lain.

Dua negara dalam menjalin suatu hubungan atau bentuk kerjasama tentu mengharapkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Seperti contoh dalam studi kasus hubungan kerjasama Tiongkok dan Indonesia, kepentingan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negaranya sehingga menjalin kerjasama penggunaan mata uang yuan dan rupiah dalam proses perdagangannya. Disamping itu, dalam kerjasama kedua negara memiliki kesepakatan-kesepakatan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua negara yang bersangkutan. Dengan adanya kesepakatan dan ketentuan tersebut kedua negara ini

akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan memberikan keuntungan dan mencapai tujuan masing-masing negara.

Dalam hal ini hubungan bilateral yang dimaksud ialah kerjasama dibidang ideologi, politik, ekonomi, keamanan, hukum dan lainnya. Sedangkan menurut Holsty dan Azhary ada beberapa variabel-variabel yang harus diperhatikan dalam kerjasama bilateral yaitu diantaranya:

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang negara miliki.
2. Keterampilan mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung tujuan.
3. Kredibilitas ancaman dan gangguan.
4. Derajat kebutuhan dan adanya ketergantungan.
5. Responivitas di kalangan pengambil keputusan. (Holsti, 1993)

Dari variable-variabel yang tertera diatas itu menandakan bahwa terdapat pertimbangan suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Dengan kata lain, tidak semua negara ingin melakukan kerjasama tanpa keuntungan yang akan didapatkan. Negara akan memilih aktor mana saja yang akan menunjang dan dapat membantu untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam hal ini, hubungan bilateral mengandung dua unsur yang erat kaitannya dengan kata kerjasama dan juga konflik. Kedua unsur tersebut mengandung arti yang berbeda dan saling bergantian, hal tersebut tergantung pada konsep apa yang ditawarkan kedua negara. Kerjasama dalam hal ini dikatakan sebagai salah satu cara

agar negara memperoleh kepentingannya dengan melakukan perundingan dan menguntungkan kedua belah pihak yang terkait. Berbicara mengenai konflik, biasanya konflik juga dijadikan sebagai salah satu alasan negara melakukan hubungan bilateral untuk menyelesaikan konflik atau bernegosiasi untuk meredam konflik yang ada.

Selain konflik, faktor lainnya ialah adanya ketergantungan negara A terhadap negara B yang mengakibatkan kerjasama terjalin. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat dekat dengan China (Tiongkok) selama bertahun-tahun kedua negara ini menjalin kerjasama diberbagai bidang. Ketergantungan terhadap negara maju seperti Tiongkok dapat membantu perekonomian Indonesia melalui kerjasama. Selain itu Tiongkok akan dengan mudahnya untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mencapai kepentingan negaranya.

Tiongkok adalah negara maju dengan ambisi ingin menjadikan mata uang yuan sebagai mata uang internasional oleh karena itu, setiap negara yang menjalin kerjasama penggunaan mata uang lokal menggunakan mata uang Yuan dalam transaksi atau perdagangan maupun investasi. Tetapi apakah rupiah digunakan di Tiongkok? Hal tersebut bukan menjadi kepentingan Indonesia, dalam kerjasama ini Indonesia hanya ingin meningkatkan perekonomiannya ditengah pandemic covid-19 yang terbukti menurunkan pendapatan

atau perekonomian Indonesia.

B. Currency Politics

Politik mata uang adalah suatu hal yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian suatu negara. Sebelum jauh membahas tentang politik mata uang, penulis akan menyajikan penjelasan tentang konsep ekonomi politik. Dimana konsep ini muncul sekitar pada abad ke-18 yang dapat ditandai dengan munculnya pergeseran istilah dari “ekonomi” menjadi “ekonomi politik”. Dalam hal ini istilah “ekonomi” diartikan sebagai manajemen tentang rumah tangga dalam suatu negara, sedangkan ekonomi politik ialah manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara (Mufti, 2018).

Dalam hal ini mengartikan bahwa ekonomi dan politik dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Para pengambil kebijakan atau keputusan pada bidang ekonomi dan bidang politik memiliki ketergantungan satu sama lain yang merupakan aktor penting dalam sistem ekonomi politik. Namun, ekonomi politik tidak dapat disamakan dengan ekonomi murni, karena keduanya adalah dua hal yang berbeda dan memiliki cara pandang yang berbeda. Secara umum, adanya kajian ekonomi politik dengan mengaitkan seluruh penyelenggaraan yang bersifat politik diberbagai aspek, baik proses maupun yang berkaitan dengan kelembagaan antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya.

Caporaso dan Levine memiliki dua defenisi secara umum

tentang ekonomi, yang pertama defenisi muncul dari Alfred Marshall yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul *Principles of Economics* tahun 1930. Alfred Marshall mengatakan bahwa, ilmu ekonomi merupakan suatu penelitian terhadap manusia dalam kesibukannya setiap hari. Dalam hal ini ilmu ekonomi meneliti bagian dari adanya suatu tindakan individu atau tindakan social yang memiliki hubungan dengan kebutuhan material dan kesejahteraan. Defenisi kedua muncul dari Lionel Robbins yang terdapat pada karyanya yang berjudul *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science* tahun 1932. Menurutnya, ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang meneliti tentang perilaku manusia sebagai salah satu hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka dan dapat digunakan dalam berbagai hal atau keperluan. Dari defenisi tersebut, terlihat bahwa ilmu ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan (Mufti, 2018). Dalam mencapai tujuannya setiap negara melakukan berbagai cara baik secara nasional maupun internasional sekalipun.

Ekonomi dianggap lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan politik. Ekonomi berfokus pada pengolahan rumah tangga, sedangkan ketika berbicara mengenai politik cakupannya adalah tata kelola negara. Sedangkan secara implisit, menurut Steuart dalam pandanganya mengatakan bahwa ekonomi berada dalam bagian dari ilmu politik, dimana ekonomi harus tunduk pada tatanan politik yang

lebih makro.

Setiap negara memiliki sistem perekonomian dan sistem politik yang berbeda-beda. Saat ini, Tiongkok mengalami transisi dari system ekonomi sosialis menjadi pasar ekonomi sosialis. Meninggalkan rezim komunis karena dianggap akan membuat Tiongkok mengalami ketertinggalan dengan negara lain. Sistem ekonomi yang dianut Tiongkok dipercaya memberikan manfaat bagi Tiongkok dan juga dunia dengan melakukan perdagangan atau kerjasama dengan Tiongkok.

Melalui kerjasama mata uang merupakan salah satu bagian ekonomi, namun hal tersebut tidak lepas dari persoalan politik. Pada penelitian ini penulis membahas tentang politik mata uang yang dilakukan oleh Tiongkok dalam kerjasama dengan Indonesia. Indonesia dengan perekonomian yang berbeda dengan Tiongkok menjalin kerjasama untuk pemenuhan dan peningkatan di bidang perekonomian negaranya. Tiongkok yang di kenal sebagai negara maju dengan perekonomian yang menyaingi Amerika Serikat menjadikan kerjasama ekonomi dalam hal ini pertukaran mata uang Yuan dan Rupiah untuk internasionalisasi mata uang negaranya.

Hal ini tidak terlepas dari ekonomi dan juga politik. Indonesia dengan tujuan ekonomi sedangkan Tiongkok dengan tujuan dalam hal politik mata uang. Politik mata uang membahas tentang ekonomi politik terhadap kebijakan yang diterapkan pada nilai tukar.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan untuk relevansi hubungan antara ekonomi politik untuk menjelaskan kebijakan mata uang karena, mata uang internasional merupakan salah satu kajian dalam studi ekonomi politik internasional. Politik mata uang menyatukan dengan teori ekonomi politik, ekonometrika yang kuat, dan analisis historis untuk dapat menjelaskan perkembangan kebijakan moneter dengan menggunakan faktor politik nasional serta pergeseran tatanan ekonomi dan juga politik global (Frieden, 2015).

Dalam buku Frieden, kerangka kerja seperti ini, dijelaskan dalam berbagai studi kasus digunakan untuk menguji relevansi antara ekonomi politik dengan kebijakan mata uang dalam berbagai tahap sejarah diantaranya: yaitu, Amerika Serikat selama transisi ke standar emas, integrasi moneter Eropa, dan kebijakan Amerika Latin. Dalam teori Frieden menjadikan elemen individual diuji secara empiris untuk memahami betapa pentingnya ekonomi politik dari adanya suatu kebijakan mata uang (Frieden, 2015). Pada penelitian ini, penulis akan mengambil studi kasus kerjasama penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Swap Arrangement*) antara Tiongkok dan juga Indonesia untuk melihat dan menganalisis bagaimana Tiongkok menjadikan mata uang yuan sebagai pembayaran internasional.

Internasionalisasi mata uang mengandung arti dalam penggunaan mata uang tersebut diterima sebagai alat pertukaran lintas batas negara baik dalam transaksi antar negara maupun aktor lainnya,

seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Sedangkan menurut Kenen, karakteristik utama mata uang internasional ialah dapat digunakan dan disimpan di luar batas teritorial negara yang menerbitkan mata uang tersebut, selain itu juga dapat memfasilitasi transaksi antar penduduk maupun non- penduduk negara lain (Kenen dalam Frieden, 2015). Mata uang internasional bisa digunakan dalam bentuk transaksi apapun baik dalam ekspor impor maupun dalam bentuk investasi serta cadangan devisa negaranya.

Dalam konsep ini penulis akan gunakan untuk melihat strategi- strategi Tiongkok untuk internasionalisasi mata uang yuan melalui bentuk kerjasama dengan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam perdagangan internasional Tiongkok dengan kawan dagangnya menggunakan yuan sebagai alat transaksi pembayarannya yang disebut praktik *invoicing* dalam perdagangan internasional. Praktik ini dapat ditentukan oleh seberapa besar kontribusi ekspor suatu negara terhadap ekspor dunia (Jayakarya, 2014).

Strategi atau kebijakan sebagai dasar untuk mengelola sistem moneter ialah rezim nilai tukar, baik itu tetap ataupun mengambang atau dipatok ke mata uang lainnya, dan tingkat harga mata uang tersebut. Keduanya memiliki arti dimana pilihan rezim tergantung pada tuntutan dan persaingan untuk stabilitas dan fleksibilitas, sementara tingkat harga diadakan dalam ketegangan

antara mendukung daya saing harga bagi eksportir dan daya beli konsumen. Teori Jeffry A. Frieden bergantung pada adanya ketidakrataan timbulnya dampak dari pengaturan kebijakan tersebut, dan mereka membentuk dimensi politik dari keputusan kebijakan mata uang. Dalam hal ini, kebijakan mata uang dianggap lebih kontroversial secara politis untuk ekonomi terbuka, dimana perdagangan internasional akan tunduk pada fluktuasi yang tidak pasti dalam arus modal internasional (Frieden, 2015).

Kebijakan nilai tukar suatu negara umumnya akan diarahkan untuk mendukung adanya neraca pembayaran dan dapat membantu efektivitas kebijakan moneter. Adanya depresiasi nilai tukar yang berlebihan akan mengakibatkan kenaikan laju inflasi sehingga mengganggu stabilitas nilai mata uang tersebut. Dengan demikian, kebijakan nilai tukar menjadi salah satu faktor untuk menunjang dan menentukan keberhasilan pengembangan suatu negara (Suseno, 2004).

Tingkat harga yang rendah dipilih oleh kebanyakan produsen dan juga para eksportir dalam persaingan global sedangkan untuk tingkat harga yang lebih tinggi lebih meningkatkan pada daya beli relatif konsumen (Frieden, 2015). Bisa dikatakan bahwa barang-barang yang diproduksi dengan tujuan ekspor dominan digunakan tingkat harga yang rendah untuk memperoleh keuntungan melalui pasar global. Pada tingkat harga lebih tinggi diproduksi dominan

untuk konsumen dalam negeri dan merupakan salah satu strategi dalam perdagangan internasional. Sementara itu, dalam perdagangan internasional melalui adanya kerjasama akan mempermudah negara dominan untuk mengatur penggunaan mata uang yang akan dijadikan sebagai pembayaran internasional.

Mata uang sebagai alat dalam politik, dimana ekonomi Tiongkok merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa Tiongkok adalah pemain terpenting dunia. Negara yang melahirkan banyak produk berlabel “*Made in China*” dan menyumbang lebih dari 12 persen total perdagangan global serta mengantongi 30 persen total cadangan devisa (*foreign exchange reserves*) dunia. Meskipun ekonomi Tiongkok terbilang sangat besar hal lain bertolak belakang dengan mata uang negara tersebut. Renmimbi kalah jauh dengan mata uang seperti dolar, yen, euro dan poundsterling dalam urutan dan tata keuangan dunia. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemerintah Tiongkok yang terlalu mengatur renmimbi yaitu dengan meningkatkan perekonomian negaranya Tiongkok melakukan devaluasi mata uang penurunan nilai mata uang terhadap dolar Amerika Serikat. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diimbangi dengan penguatan mata uang (Zaenudin A. , 2021).

Dalam penggunaan studi kasus serta adanya faktor historis dan faktor kontekstual, politik mata uang memberikan penjelasan

dalam sebuah narasi yang memiliki makna untuk analisis. Analisis ekonomi murni pada umumnya deterministik dan berusaha untuk memperhitungkan faktor-faktor kontingen. Dengan memperhatikan aspek sosial, kelembagaan maupun sejarah, dan memperlakukan ekonomi sebagai akibat dari adanya sebuah fenomena yang kompleks dan saling ketergantungan satu sama lain. Sebagai awal ekonomi politik kebijakan mata uang bersifat intuitif, dalam gagasan bahwa orang akan melobi atau memilih pengaturan kebijakan mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Sehingga melalui studi kasus selain untuk memperkuat faktor kontekstual dan historis, hal tersebut juga akan membantu dalam menganalisis kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan pengaruh besar pada negara maupun dalam taraf internasional (Frieden, 2015).

C. Kajian literatur

Dalam pembahasan internasionalisasi mata uang, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang akan dijabarkan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu sebagai berikut;

1. Jurnal hubungan internasional yang ditulis oleh Edy Jayakarya pada tahun 2014 yang berjudul “Internasionalisasi Mata Uang *a la* Cina”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan internasionalisasi mata

uang versi Cina yaitu pertama, internasionalisasi mata uang haruslah dapat melibatkan adanya peran aktif oleh negara yang dianggap sebagai aktor dalam perekonomian global. Kedua, internasionalisasi mata uang tersebut, haruslah dilakukan secara gradual dan *prudent* dengan merancang adanya suatu program unggulan sebelum menerapkannya secara penuh. Dalam hal ini dikatakan seperti PRTSS dan juga *offshore market* yang dirancang untuk melihat tren internasionalisasi mata uang dan juga digunakan untuk mengontrol stabilitas nilai kurs serta adanya ekspansi capital terlalu berlebihan dari investor asing. Ini bertujuan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional terhadap fluktuasi nilai kurs yang dapat berakibat pada krisis dan dapat mengurangi kepercayaan internasional untuk berinvestasi menggunakan mata uang yuan. Ketiga, yaitu membentuk *double currency* yang tidak berlaku sama antara di *onshore market* dan *offshore market*, dimana nilai kurs dari *onshore market* dapat atau berada dalam kontrol bank sentral, sedangkan di *offshore market* dilepaskan ke pasar. Sehingga hal tersebut dapat menarik minat para investor untuk menggunakan atau memegang mata uang yuan, terlebih mata uang yuan yang berada di *offshore market* dapat diinvestasikan kembali ke *onshore market* walaupun melalui adanya persetujuan SAFE. Terakhir adalah membentuk *financial hubs* dengan tujuan untuk memperluas dimensi internasionalisasi. Penelitian ini memiliki perbedaan yang

terletak pada strategi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep kerjasama bilateral dan *currency politics*. Melihat bagaimana Tiongkok memanfaatkan kerjasama dengan negara lain untuk menjadikan mata uang yuan sebagai pembayaran lintas batas negara (Jayakarya, 2014).

2. Penelitian terkait mata uang yuan juga berasal oleh seorang Profesor yang bernama Ulrich Volz pada tahun 2013 dengan judul “*All Politics is Local: The Renminbi’s Prospects as a Future Global Currency*”. Dalam penelitian tersebut, Ulrich mengatakan bahwa RMB dapat diterima dengan sangat cepat sebagai mata uang utama untuk pembuatan faktur dan penyelesaian perdagangan, sebagai mata uang transaksi keuangan dan investasi, dan sebagai cadangan utama mata uang untuk bank sentral. Apakah dan kapan RMB akan menjadi mata uang utama global? Sebagian besar tergantung pada stabilitas ekonomi dan politik Cina dan pada kemampuan kepemimpinan Cina dalam mereformasi sistem keuangan domestik. RMB internasionalisasi adalah hal yang tampak sebagai suatu yang asertif, ofensif, dan kemampuan sistemik keuangan suatu negara. Tiongkok yang semakin meningkatkan mata uang yuan dengan cara mempromosikan peningkatan penggunaan global RMB, menggantikan dolar AS, hal tersebut termasuk dalam ekonomi politik domestik suatu negara. Pertempuran politik domestik Cina bertujuan untuk

internasionalisasi mata uang menjadi ketidaksepakatan laju reformasi ekonomi domestik dengan perjuangan atas kebijakan luar negeri Cina. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Tiongkok terhadap hierarki mata uang global melalui internasionalisasi RMB sebagian besar berasal dari keinginan para reformis Cina untuk merestrukturisasi sektor keuangan yang tidak efisien. Maka, hal tersebut berfokus pada inisiatif bilateral dan ofensif, seperti bantuan asing yang terkait dengan kontrak sumber daya alam, atau pengaturan dalam pertukaran mata uang bilateral. Dalam penelitiannya, RMB dapat menggantikan dolar AS sebagai mata uang global bergantung pada kebijakan AS untuk menjaga internal dan nilai eksternal dolar. Dalam hal ini, ketidakmampuan sistem politik AS untuk menempatkan fiskal negara akan berpengaruh pada penggunaan atau peminat dolar yang semakin rendah. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ialah melihat bagaimana meningkatkan penggunaan yuan melalui kerjasama dengan negara lain, dengan memanfaatkan ekonomi maju Tiongkok dan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan perdagangan dengan negara *partner*. Dengan demikian yuan bisa digunakan dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (Volz, 2013).